

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 523–534.  
<https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19631>
- Badan Pengelola Pendapatan Daerah. (2022). *Laporan Kinerja Bappenda 2022 Final*.  
[https://bappenda.ntbprov.go.id/doc/ppid/LAPORAN%20KINERJA%20BAPPENDA%202022%20FINAL\\_comp-compressed.pdf](https://bappenda.ntbprov.go.id/doc/ppid/LAPORAN%20KINERJA%20BAPPENDA%202022%20FINAL_comp-compressed.pdf)
- Badan Pengelola Pendapatan Daerah. (2023). *Pendapatan Pajak Daerah*.  
<https://data.ntbprov.go.id/dataset/pendapatan-pajak-daerah>
- Boynton, W. C., & Johnson, R. N. (2006). *Modern Auditing Assurance Service And The Integrity Of Financial Reporting* (8th ed.). John Wiley & Sohn.
- Fadila, A. N. (2022). *Implementasi Pengendalian Internal Internal Atas Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Bulukumba*. Skripsi tidak diterbitkan. Program Studi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin. (2012). *Pedoman Penulisan Skripsi* (1st ed.). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Fatmawati, S. (2018). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan*. Skripsi tidak diterbitkan. Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Fauziah, Imam, M., & Nailulfari, F. (2023). *Hukum Pajak Digital*. UM Jember Press.
- Harahap, H. S. (2019). *Implementasi Pengendalian Internal Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*. Skripsi tidak diterbitkan. Program Studi Perpajakan Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/172147/>
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Juniarti, E. (2012). Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dispenda Bersama Samsat Kota Singkawang. *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 1(1), 43–66.
- Kabar Harian Bima. (2019, August 31). *Langgar Lalu Lintas, Polres Bima Tilang 109 Kendaraan*. Kahaba.Net. <https://kahaba.net/berita-bima/68820/langgar-lalu-lintas-polres-bima-tilang-109-kendaraan.html>
- Meliala, T. S., & Oetomo Fransisca Widianti. (2008). *Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Semesta Media.
- Moeller, R. R. (2016). *Brink's Modern Internal Auditing Eighth Edition* (8th ed.). John Wiley & Sons.
- Natsir, M. (2023). *Analisis Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kabupaten Bima*. Skripsi tidak diterbitkan. Program Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pub. L. No. 51, 1 (2016).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah, Pub. L. No. 10, 1 (2021).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/154510/PP%20Nomor%2010%20Tahun%202021.pdf>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pub. L. No. 60, 1 (2008).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/37326/PP%2060%20Tahun%202008.pdf>

Purnomo, Atmoko, D., & Hakim, L. (2022). *Regulasi Pajak Penghasilan*. CV. Literasi Nusantara Abadi.

Putra, I. M. (2017). *Perpajakan (Tax Amnesty)*. Anak Hebat Indonesia.

Rahmah, A. R. (2020). *Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pada Perguruan Tinggi XYZ*. Skripsi tidak diterbitkan. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Ristanto, I. A. (2017). Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Piutang Di PT Supralita Mandiri. *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 19(2), 138–140.  
<https://journal.uniba.ac.id/index.php/PRM/article/view/19>

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business A Skill-Building Approach*. John Willey & Sons.

Sumarna, A. D., & Novitasari, N. F. (2022). Coso Framework Sebagai Basis Penilaian Efektivitas Pengendalian Internal Penerimaan Kas (Studi Kasus

PT LEP). *Jurnal Akun Nabelo*, 4(2), 659–670.  
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/jan/article/view/17429/pdf>

Suparmono, & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia* (R. Fiva, Ed.). Penerbit Andi.

Syafni, R. A. (2021). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Stabat*. Skripsi tidak diterbitkan. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23, 1 (2014).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. 7, 1 (2021).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/178620/UU%20Nomor%207%20Tahun%202021.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 1, 1 (2022).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/189520/UU%20Nomor%201%20Tahun%202022.pdf>

UPPD Panda Bima. (2022). *Hasil Penilngan Operasi Gabungan UPTB UPPD Panda Bima Bulan Desember 2022*.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

**Lampiran 1****BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Larasati  
Tempat, tanggal lahir : Donggobolo, 19 Maret 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Rumah : Jl. Politeknik Tamalenrea, Makassar  
Telpon Rumah dan HP : +62 82359356466  
Alamat *E-mail* : [larasati5907@gmail.com](mailto:larasati5907@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan**

- Pendidikan Formal
  - a. SDN Pandai Woha
  - b. SMP Negeri 3 Woha
  - c. SMAS Kae Woha
- Pendidikan Nonformal
  - a. Pelatihan *Basic Learning Skills, Character and Creativity* (2019)
  - b. Pelatihan Dasar KSR PMI UNHAS (2019)
  - c. Latihan Dasar Kepemimpinan II IWA MBOJO UNHAS (2019)

**Pengalaman Organisasi**

1. KSR PMI UNHAS
2. IWA MBOJO UNHAS MAKASSAR
3. KMW BIMA-MAKASSAR

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya

Makassar, 21 September 2023



Larasati

**Lampiran 2****KUESIONER PENELITIAN**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin, penulis bermaksud untuk menulis skripsi yang berjudul **Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Bima.**

Penyebaran kuesioner kepada responden atau informan merupakan salah satu metode pengumpulan data. Oleh karena itu, saya mengharapkan kesiapan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner sebagai data yang akan di gunakan dalam penelitian. Terima kasih atas bantuan dan kerja samanya.

Penulis



( Larasati )

**IDENTITAS RESPONDEN**

Berilah tanda **centang** (✓) pada setiap kotak yang tersedia sesuai dengan identitas Anda. Setiap pertanyaan mengharapkan hanya satu jawaban

4. Nama : (boleh diisi atau tidak)

5. Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

6. Usia : \_\_\_\_\_ Tahun

7. Lama Bekerja : \_\_\_\_\_ Tahun

8. Jabatan :

**PETUNJUK PENGISIAN**

3. Harap mengisi identitas yang disediakan sebelum menanggapi pertanyaan dan pernyataan kuesioner.
4. Kuesioner ini semata-mata digunakan untuk keperluan akademis, mohon menjawabnya dengan jujur tanpa pengalaman dan penilaian Bapak/Ibu tanpa paksaan dari pihak manapun.
5. Bacalah dan jawablah semua pertanyaan dan pernyataan dengan teliti tanpa ada yang terlewatkan.
6. Berilah tanda centang atau silang ( ✓ / × ) pada kolom Ya atau Tidak.



No.	Pernyataan	Ya	Tidak
<b>Lingkungan Pengendalian</b>			
1	Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika		
2	Kepemimpinan yang kondusif		
3	Pembentukan struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas		
4	Komitmen terhadap Sumber Daya Manusia yang berkompeten		
5	Kejelasan terkait wewenang dan tanggung jawab		
<b>Penilaian Risiko</b>			
1	Penetapan tujuan perusahaan		
2	Identifikasi dan analisis dampak risiko terhadap tujuan perusahaan		
3	Mempertimbangkan aspek risiko kecurangan		
4	Identifikasi risiko atas perubahan kondisi yang signifikan		
<b>Kegiatan Pengendalian</b>			
1	Pengendalian terkait mitigasi risiko		
2	Pengendalian atas aspek teknologi informasi (TI)		
3	Kebijakan dan standar pengendalian		
<b>Informasi dan Komunikasi</b>			
1	Informasi yang berkualitas dan relevan untuk pengendalian internal		
2	Mengkomunikasikan informasi secara internal terkait pengendalian internal		
3	Menjalinkan komunikasi dengan pihak eksternal terkait informasi perusahaan		
<b>Monitoring</b>			
1	Pengawasan dan pengendalian terhadap pengendalian internal		
2	Identifikasi kelemahan dalam evaluasi pengendalian internal		

Lampiran 3

HASIL PELAKSANAAN OPERASI GABUNGAN  
UPTB UPDP PANDA BIMA  
BULAN DESEMBER 2022

FORM 9

NO	BULAN	RODA 2				RODA 4				SIGA			
		TERJARING (Rp)		TERBAYAR (Rp)		SISA (Rp)		TERJARING (Rp)		TERBAYAR (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		OBYEK		OBYEK		OBYEK		OBYEK		OBYEK		OBYEK	
1	JANUARI	124	76.569.854	91	47.524.473	33	29.045.381	77	288.913.812	54	205.861.500	23	56.022.312
2	FEBRUARI	97	61.471.556	74	39.032.754	23	22.438.802	99	269.787.457	83	195.005.829	16	70.781.628
3	MARET	83	47.760.137	66	29.059.960	17	18.700.177	106	339.935.015	89	253.068.212	17	76.866.803
4	APRIL	95	55.695.690	82	40.532.778	13	15.162.912	90	350.833.867	78	301.765.879	12	49.067.988
5	MEL	94	69.156.835	77	52.477.994	17	16.678.841	50	182.978.933	45	155.638.224	5	26.340.709
6	JUNI	93	51.816.387	84	44.374.835	9	7.443.552	72	268.840.375	63	238.805.240	9	30.035.135
7	JULI	88	55.485.673	74	38.184.087	14	17.301.586	72	275.907.665	67	227.447.858	5	48.459.837
8	AGUSTUS	51	20.723.880	44	18.065.045	7	2.658.835	43	123.322.628	39	116.415.827	4	6.906.801
9	SEPTEMBER	64	26.086.750	57	21.193.900	7	4.895.150	49	127.451.145	45	112.213.988	4	15.237.157
10	OKTOBER	73	27.424.226	68	24.362.101	5	3.062.125	45	142.403.725	42	134.879.553	3	7.524.172
11	NOVEMBER	91	37.257.261	76	29.767.462	15	7.489.799	62	152.155.749	55	127.988.506	7	24.167.243
12	DESEMBER	48	19.395.300	44	17.538.050	4	1.857.250	22	64.311.303	18	45.803.701	4	18.507.602
	JUMLAH	1.001	548.847.549	837	402.113.139	164	146.734.410	787	2.596.841.704	678	2.133.924.317	109	462.817.387

NB. Data Per Tanggal 26 Desember 2022

PANDA BIMA, 31 DESEMBER 2022  
KEPALA UPTB UPDP PANDA BIMA

UPTB  
UPDP  
PANDA BIMA  
ROERIS SAFFERA PUTRA, ST., ME.  
18270510 200312 1 006

## Lampiran 4



**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN SESUAI STS  
PADA UPTB-UPPD PANDA BIMA  
S/D 31 DESEMBER 2022**

NO.	URAIAN	TARGET TAHUN	REALISASI						%
		2022	S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		
	I	2	3	4	5	6			
<b>I</b>	<b>PKB dan BBNKB</b>	<b>32.242.919,088</b>	<b>27.785.374,486</b>	<b>2.606.556,947</b>	<b>30.391.931,433</b>			<b>94,26%</b>	
1	PKB	15.784.247,638	17.427.939,171	1.551.810,608	18.979.749,779			120,24%	
2	BNKB	16.458.671,450	10.357.435,315	1.054.746,339	11.412.181,654			69,34%	
<b>II</b>	<b>PENDAPATAN DENDA PAJAK dan SP III</b>	<b>2.504.305,000</b>	<b>568.560,937</b>	<b>20.900,366</b>	<b>589.461,303</b>			<b>23,54%</b>	
1	DENDA PKB	1.798.572,000	437.714,002	2.349,305	440.063,307			24,47%	
2	DENDA BBNKB	32.108,000	46.771,935	9.451,061	56.222,996			175,11%	
3	SP III	673,625,000	84.075,000	9.100,000	93.175,000			13,83%	
	<b>JUMLAH</b>	<b>34.747.224,088</b>	<b>28.353.935,423</b>	<b>2.627.457,313</b>	<b>30.981.392,736</b>			<b>89,16%</b>	

PANDA-BIMA, 31 DESEMBER 2022



**WIRIS SAHPUTRA, ST., ME.**  
NIK: 950270510 200312 1 006

## Lampiran 6

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Awalia Nurul Fadila (2022)	Implementasi Pengendalian Internal Atas Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Bulukumba	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Bulukumba telah terlaksana berhasil dan terlaksana dengan baik oleh pihak pelaksana pada bagian pendaftaran, penetapan, serta pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
2.	Rizka Aprina Syafni (2021)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Stabat	Target penerimaan dari tahun 2016-2019 telah efektif, namun pada tahun 2020 kurang efektif dikarenakan beberapa faktor yang pertama karena pengaruh pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Selanjutnya penerapan sistem pengendalian intern pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Stabat telah efektif kecuali pada unsur lingkungan pengendalian dan unsur kegiatan pengendalian yaitu kurangnya penegakan integritas dan nilai etika seperti kedisiplinan pegawai, dan belum adanya pelatihan pegawai dari samsat.
3.	Siti Fatmawati (2018)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal terkait pemungutan PKB belum sepenuhnya efektif terutama pada komponen lingkungan pengendalian. Hal tersebut dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya pemberian pelatihan kerja kepada pegawai
4.	Indra Mulia Zahty (2017)	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Pada Dispenda Kota Medan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pengendalian internal sudah baik namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan dan penaksiran risiko yang belum maksimal dijalankan oleh pihak Dinas Pendapatan Kota Medan.

5.	Eti Juniarti (2012)	Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dispenda Bersama Samsat Kota Singkawang	Kesimpulan yang didapat dari hasil pembahasan mengenai sistem dan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : Evaluasi sistem dan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Singkawang sudah berjalan efektif dan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya bagian-bagian yang terlibat seperti: bagian pengambilan formulir dan pengisian formulir, bagian pendaftaran, bagian penerbitan SKPD, penetapan PKB dan SWDKLLJ, dan bagian pembayaran dan penyerahan. Selain itu formulir yang digunakan serta rangkap distribusinya sudah dijalankan dengan baik. Untuk informasi dalam formulir sudah memadai karena berisi informasi yang benar-benar diperlukan sebagai pembuktian keaslian arsip kendaraan bermotor.
7.	Nova Liliana (2012)	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Malang Kota)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada Kantor Bersama Samsat Malang Kota telah terlaksana dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pembagian tugas yang jelas, dilakukan audit secara periodik. Namun dalam pembagian wewenang terkait informasi formulir masih kurang optimal karena penyusunannya masih belum tersistematis.

## Lampiran 7

### HASIL WAWANCARA

Narasumber : Noeris Satria Putra, ST., ME.

Waktu : Rabu, 5 Juli 2023

Tempat : 13.00 WITA

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor?

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pemungutan PKB kami telah melaksanakan unsur-unsur yang ada pada SPIP sehingga capaian PKB melampaui target yang ada.

2. Adakah pedoman kebijakan atau prosedur dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor?

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950).
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6).

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011, Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 9).
  - Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7).
  - Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penagihan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 50).
3. Kendala apa saja yang dihadapi Samsat Kabupaten Bima dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor?
- Kesadaran Wajib Pajak yang masih minim dalam memenuhi kewajibannya.
  - Faktor geografis yang menghambat WP untuk memenuhi kewajibannya.
4. Bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Bima.
- SOP Layanan Samsat Terlampir.
5. Adakah satuan yang menjadi pengawas Internal di Kantor Samsat Kabupaten Bima. Kalau ada Siapa?
- Ada, Bidang Pengendalian dan Pembinaan Bappenda Provinsi NTB.
6. Apakah ada pelatihan khusus yang dilakukan pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai pada masing-masing bidang.



- Ada, seperti Pelatihan Juru Sita Pajak, Pelatihan Pranata Komputer, Pelatihan Tenaga Administrator dll.

7. Siapa Auditor Eksternal Kantor Samsat Kabupaten Bima.

- BPKP
- BPK

8. Dengan instansi apa saja Samsat Kabupaten Bima memiliki hubungan kerja?

- Kepolisian Daerah Bima
- TNI
- PT. Jasa Raharja
- Pemerintah Kabupaten Bima sampai pada tingkat Pemerintah Desa
- Dinas Perhubungan Kabupaten Bima
- PT. Bank NTB Syariah
- Serta instansi terkait lainnya

9. Pada Sistem Pengendalian Internal, unsur pemantauan apa yang dilakukan Samsat Kab. Bima untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pemantauan dilaksanakan suatu entitas dalam rangka mengatasi masalah yang di temui dan supaya tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemantauan berkaitan dengan evaluasi yaitu untuk meningkatkan efektivitas program.

Kami menerapkan Prinsip pelaksanaan pemantauan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Ekonomisasi
- Efisiensi.
- Efektivitas.

Sehingga apa yang menjadi target dapat kami capai sesuai dengan perkembangan keadaan yang terjadi pada saat itu.

10. Apa saja yang dilakukan Samsat Kabupaten Bima dalam mengatasi hambatan.

- Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur yang ada.
- Meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan Kesamsatan yang ada dengan mendekati pada kebutuhan masyarakat.
- Peningkatan dan penambahan fasilitas pelayanan yang memadai.
- Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan terarah.

11. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PKB.

a. Obyek Aktif

- Mengoptimalkan pelayanan di semua Kantor Bersama Samsat dan Unit Layanan Pembantu.
- Mengoptimalkan penggunaan Layanan *E-Samsat* , *Samsat delivery*, *Samsat Apps* dan *Samsat Signal*.
- Mengoptimalkan *Call Center* untuk menghubungi wajib pajak.
- Melakukan Sosialisasi terus-menerus.
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara periodik.
- Menyampaikan pemberitahuan baik lewat telepon, *SMS* maupun Surat Pemberitahuan.
- Memfasilitasi Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.

b. Obyek TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang)

- Melakukan Operasi Gabungan.
- Penyederhanaan persyaratan pendaftaran.
- Penyederhanaan prosedur BBNKB II.
- Melakukan evaluasi secara berkala.
- Penyampaian Surat Teguran.

- Mencegah Wajib Pajak yang sudah datang ke Samsat agar tidak pulang karena tidak memenuhi persyaratan dengan memberikan bantuan untuk melakukan pembayaran.
- Memberikan Insentif Pajak dengan skema yang lebih menarik untuk meningkatkan respons Wajib Pajak.

12. Kantor Samsat Panda Bima berdiri sejak kapan.

- Kantor Samsat Panda Bima atau UPTB Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima sebelumnya merupakan bagian UPTB UPPD Raba Bima, pada tanggal 03 Januari 2017 berdiri menjadi UPTB UPPD Panda Bima.
- Kantor ini berada di bawah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB.